

TUJUH FRAKSI SOROTI KINERJA PEMKAB KUBU RAYA

Penyertaan Modal PDAM Belum Tuntas

SUI RAYA-DPRD Kubu Raya menggelar sidang paripurna penyampaian LKPJ Bupati Kubu Raya tahun anggaran 2011. Tujuh fraksi pun menyoroti keseriusan Pemkab Kubu Raya untuk membenahi permasalahan aset dengan tujuan untuk menghindari penilaian opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kemarin.

Dalam sidang berbagai pandangan akhir disampaikan sejumlah fraksi mengenai kinerja Pemkab Kubu Raya, diantaranya mengenai penyertaan modal pada PDAM Tirta Raya yang di dalamnya termasuk hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kubu Raya sebesar Rp20.667.780.000,00 yang belum jelas statusnya.

Sehingga hal itu, tambah Nely mengakibatkan sampai saat ini, penilaian pengelolaan keuangan dan aset daerah Kubu Raya selalu mendapat penialain buruk. Untuk itu disarankan kepada Pemkab agar bisa lebih serius dalam membenahi permasalahan aset. Untuk mengelola aset, Pemkab dapat menggandeng pihak ketiga untuk membantu pendataan aset dan memperbaiki pengelolaan keuangan. "Tidak ada salahnya jika pihak ketiga dilibatkan demi memperbaiki dan membenahi permasalahan yang belum selesai," terangnya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, bahwa pihaknya selama tiga tahun terakhir ini sudah bekerja cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan naiknya peringkat Kubu Raya dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan RI Kalimantan Barat, di mana dari hasil pemeriksaan keuangan tahun 2012 mendapatkan penilaian Wajar dengan Pengecualian.

Muda tidak menafikan jika masih ada mutasi aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya belum dirinci secara lengkap. Karena belum didukung bukti-bukti yang memadai serta penyerahan dan inventarisasi aset hibah dari Pemerintah Kabupaten Pontianak belum tuntas. "Kedepan kita akan segera menyelesaikan masalah tersebut dengan melibatkan kabupaten induk. Sehingga masalah-masalah yang menjadi sorotan fraksi di DPRD dapat terselesaikan," janjinya. (adg)

Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kubu Raya, Bambang Sriadi menilai permasalahan aset hingga saat ini belum juga selesai. Padahal permasalahan pembenahan aset sudah lama sejak 2010 hingga 2011. "Itu adalah bentuk ketidak seriusan Pemkab untuk membenahinya," tandas Bambang.

Menurut Bambang, Fraksi Demokrat dan enam fraksi lainnya di DPRD Kubu Raya sudah menilai pelaporan keuangan Kubu Raya sangat baik. Hanya saja karena ada kendala pada pembenahan aset yang tersangkut di Kabupaten Pontianak sebagai kabupaten induk dan masalah kerja sama dengan PLN, Kubu Raya selalu mendapatkan penilaian "Tidak Wajar".

Meski telah melakukan berbagai upaya secara bertahap, lanjut Bambang hasil pemeriksaan BPK RI mencatat pengecualian yaitu pada Dinas Kesehatan terdapat selisih nilai persediaan obat sebesar Rp283.424.775,00 antara neraca dibandingkan dengan saldo akhir di gudang farmasi dan puskesmas. "Kedepan hal-hal yang kurang harus diperbaiki, agar kedepan Kubu Raya mendapat penilaian yang baik dari BPK RI," katanya, kemarin.

Sorotan mengenai kinerja Pemkab Kubu Raya juga disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Nelly Leony. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini belum mengakui penyertaan modal pada PDAM Tirta Raya dan termasuk di dalamnya hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kubu Raya sebesar Rp20.667.780.000,00 yang belum jelas statusnya.